BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga menjadi harapan bangsa dimasa depan yang harus diakui dan dilindungi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah telah memberikan hak-hak kepada anak yangtelah didapatkan sejak anak tersebut dilahirkan. Sesuai dengan konstitusi tersebut, ditegaskan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hak anak atas perlindungan oleh orang tua untuk melindungi anak tersebut. Terkait tersebut, perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan mengenai kesejahteraan anak.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, perlindungan hukum terhadap anak meliputi kesejahteraan anak dibidang jasmani, rohani dan sosial.Undang-Undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani rohani dan social.²

¹ Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan anak, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

² MG.Endang Sumiarni dan Chandera Halanim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan, Universitas Admajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.12

Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.³ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *fundamental rights and freedoms of children* serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ditinjau dari sifat perlingkungannya, sifat perlindungan anak dapat dibedakan menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana serta hukum adat, dan perlindungan yang bersifat *non-yuridis*, meliputi perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁵ Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Untuk melakukan pembinaan dan perlindungan anak, dibutuhkan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya

³ Maidin Gultom, 2020, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, hlm. 68-69.

⁴ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak, Maju Mundur*, Bandung, hlm. 1.

⁵ Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm.20

masyarakat, organisasi sosial, media massa, serta lembaga pendidikan.

Maraknya kasus yang sedang terjadi di Indonesia dan sedang kontroversi ialah perkawinan dibawah umur atau yang sering dikenal dengan perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan diusia yang terlalu muda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Seorang anak dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan.”

KUHPerdata Pasal 330 juga memberikan penjelasan terkait dengan batas usia dewasa yang berbunyi

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”

dan masih banyak lagi keanekaragaman pengertian anak tentang minimal batas usia tersebut.

Pengaturan tentang dispensasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Kenyataannya dispensasi yang diberikan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, karena seolah-olah memperbolehkan Perkawinan di bawah umur yang sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang tercantum didalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun adanya pengaturan tentang dispensasi tersebut, kita sebagai masyarakat harus melihat dan memikirkan kembali adanya dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan dibawah umur tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal

4 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pula bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Dampak yang paling dirasakan bagi anak yang melakukan Perkawinan dibawah umur menimbulkan persoalan rumah tangga antara lain adanya percekocokan, ketidakstabilan emosi antara suami dan isteri, dampak yang juga dirasakan anak perempuan sebagai isteri yaitu mereka akan kehilangan masa- masa remaja dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, apalagi jika ditambah dengan masalah kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang secara biologis alat-alat reproduksinya masih proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia dibawah umur, sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Hal itu, berkaitan juga kepada anak yang dikandung, ibu tersebut belum bisa memberikan keterampilan untuk mengasuh anaknya, karena adanya sifat keremajaan yang masih di miliki seorang ibu muda tersebut daripadamemiliki sifat keibuannya. Bagi wanita yang melangsungkan Perkawinan dibawah umur 20 tahun, apabila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan besarnya angka kelahiran prematur bagi anak yang dikandung, dan yang lebih parahnya

akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian bagi ibu muda saat melahirkan dan juga bayinya, hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam kehidupan masyarakat masih ada yang belum memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Masih ada saja anak yang di bawah umur mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan usia dini dan harus melaksanakan Perkawinan. Perkawinan anak di bawah umur terjadi, karena banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya Perkawinan anak di bawah umur adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya faktor ekonomi, dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Dengan kurangnya faktor tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai batas usia Perkawinan anak.

Disini ada juga peranan adat terhadap perkawinan di bawah umur. Dimana dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peranan berarti sesuatu yang diperbuat yang memiliki pengaruh besar pada suatu peristiwa dan memiliki fungsi untuk memberikan perubahan pada sesuatu. Peran dapat disamakan dengan fungsi, karena sama mempunyai fungsi serta tugas dalam suatu peristiwa, sama halnya dengan tubuh manusia yang memiliki bagian-bagian yang memiliki bagian dan tugas masing-masing sebagai pembentuk organisme yang utuh. Sesuai dengan arti peranan di atas bahwa hukum adat dan awig-awig besar pengaruhnya pada suatu peristiwa, yakni berperan sebagai pedoman atau patokan-patokan dalam penyelesaian kasus perkawinan di bawah umur yang pernah terjadi di

Kabupaten Gianyar. Hukum adat dalam hal perkawinan tidak menentukan secara tegas mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, walaupun demikian untuk memberi arti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terhadap perkawinan di bawah umur yang terjadi di dalam masyarakat hendaknya ada reaksi-reaksi demi untuk memuliakan ketentraman dan keseimbangan yang terjadi akibat adanya perkawinan di bawah umur tersebut.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa. Batas usia anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah usia dua puluh satu tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia dua puluh satu tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.⁶ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disebut peraturan pelaksanaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal Perkawinan, pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan Perkawinan di usia muda dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan

⁶ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak, Maju Mundur, Bandung*, hlm. 5.

usia Perkawinan, paling tidak laki-laki berumur sembilan belas tahun dan perempuan berumur enam belas tahun. Secara umur, cenderung menunda usia Perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan Perkawinan anak dibawah umur.⁷

Perkawinan anak adalah Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak yang masih di bawah umur ini juga banyak terjadi pada masyarakat kita terutama yang tinggal di pinggiran kota dan pedesaan. Perkawinan anak ini mengandung sifat paksaan yang dilatar belakangi antara lain, untuk menghindari terjadinya Perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua/kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan wasiat dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Perkawinan yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk-beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran Perkawinan itu sendiri.⁸

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, penduduk yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 515.344 jiwa. Berdasarkan data ini, adanya kemungkinan perkawinan usia dini dengan rentan umur sepuluh tahun hingga enam belas tahun di Kabupaten Gianyar masih terjadi. Untuk mengetahui data yang lebih spesifik mengenai jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Gianyar, perlu dilakukan suatu bentuk penelitian ilmiah terkait dengan batas usia perkawinan yang diatur oleh

⁷ H.M.Abdi Koro, 2020, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung, hlm. 2.

⁸ Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta, hlm. 8.

Undang-Undang terkait dengan efektifitas keberlakuan Undang-Undang dalam mengatur perkawinan berdasarkan usia ideal, sehingga dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Gianyar mulai dari tahun 2017 sampai 2020 diketahui ada sebanyak 68 kasus perkawinan dini. Jumlah perkara dispensasi pada kurun waktu 2017 sampai 2020 ada sebanyak 18 perkara. Dari 68 perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Gianyar, hanya 18 perkawinan yang meminta dispensasi ke Pengadilan terlebih dahulu. Jadi dari 68 perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Gianyar dan hanya 18 perkawinan dini yang meminta dispensasi sebelum melangsungkan perkawinan ke Pengadilan, ini membuktikan bahwa hanya sedikit dari pasangan tersebut yang mengetahui betapa pentingnya dispensasi bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Dispensasi pada dasarnya merupakan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi karena adanya alasan tertentu atau sebab tertentu terpaksa diberi dispensasi oleh Pengadilan. Pengaturan tentang dispensasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa :

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Dispensasi yang diberikan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, karena seolah-olah memperbolehkan perkawinan di bawah umur

yang sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang tercantum didalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun adanya pengaturan tentang dispensasi tersebut, kita sebagai masyarakat harus melihat dan memikirkan kembali adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur tersebut.

Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur akan semakin maksimal apabila tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut, tetapi juga peran masyarakat terlebih kepada peran keluarga yang sangat berpengaruh untuk mengurangi perkawinan dibawah umur. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena selain tidak mencantumkan ketentuan yang cara khusus mengatur tindakan dan ketentuan dalam menangani perkara dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan anak, tujuan adanya perlindungan tersebut didalam dispensasi nikah agar keberadaan dari hak-hak anak terpenuhi, serta pencegahan untuk melarang anaknya melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau alasan lainnya pun, tetap

tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia anak. Dengan adanya dispensasi nikah ini menjadi jalan pembuka untuk melegalkan pernikahan anak dan menjadi boomerang bagi negara dikarenakan belum terpenuhinya tujuan untuk mengurangi tingkat pernikahan anak, rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan adanya dicantumkan kebolehan dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (2), dalam peningkatan batas usia minimal menikah masih terkesan memberi peluang untuk bisa menyampingkan ketentuan dalam ayat 1, yang mana dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dalam ayat 2 tersebut terlihat tidak adanya ketidak konsistensian pemerintah dalam menangani terjadinya perkawinan di bawah umur. Karena dampak adanya dispensasi nikah ini juga anak juga bisa menikah dengan legal lewat dispensasi nikah, seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan akibat dari ketidakpastian hukum dan multitafsir penjelasan tentang frasa “alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Sehingga yang terjadi praktik melakukan pernikahan usia anak sampai saat ini pun terus terjadi meski usianya belum mencapai ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dan dapat diperolehnya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Membuat penggunaan pasal tentang dispensasi nikah ini mengakibatkan lonjakan yang tinggi terjadinya pernikahan di usia anak di beberapa daerah di Indonesia. Dikutip dari harian online, adanya kasus Perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dimana salah satu kasus yang terjadi adalah seorang anak SD berumur tiga belas

tahun menikah dengan seorang pria yang mempunyai umur yang jauh lebih dewasa dari anak tersebut.⁹ Perkawinan itu terjadi diakibatkan keadaan anak tersebut dalam keadaan telah hamil. Hal inilah yang menjadi menarik dan penting untuk diangkat dan dilakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN USIA DINI**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Anak Dalam Perkawinan Usia Dini?
2. Apa Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Terjadinya Perkawinan Usia Dini?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pembahasan permasalahan Perkawinan usia dini yang marak terjadi dilakangan masyarakat. Penelitian ini hanya membahas Perkawinan usia dini dan hanya di wilayah hukum Kabupaten Gianyar, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun yang menjadi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada bagian permasalahan yang pertama akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai pengaturan hukum terhadap anak dalam perkawinan usia dini.

⁹ Anisa Putri, "Pernikahan Dini Picu Kenaikan Angka Kemiskinan Di Gianyar" Suara Dewata, 2 Juli 2023, <https://www.suaradewata.com/read/1030/pernikahan-dini-picu-kenaikan-angka-kemiskinan-di-bangli.html>

2. Kemudian pada bagian permasalahan yang kedua akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai akibat hukum bagi anak dalam terjadinya perkawinan usia dini.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk Mengkaji Pengaturan Hukum Terhadap Anak Dalam Perkawinan Usia Dini.
2. Untuk Mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Terjadinya Perkawinan Usia Dini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perkawinan Usia Dini.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dalam hal penelitian ini, maka pendekatan perundang-undangan yakni menelaah semua undang-undang yang sedang di tangani, Sedangkan pendekatan fakta yang dilakukan adalah melihat hukum yang berlaku dikalangan masyarakat sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat tersebut.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengenai hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) mengenai hak anak atas perlindungan oleh orang tua.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan; Pasal 26 mengenai kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari sumber literasi buku-buku, makalah, artikel, Jurnal, surat kabar, majalah, tabloid, internet, yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dapat berupa bahan penunjang dari bahan primer dan sekunder di atas. Bahan hukum tersier ini berupa kamus umum, kamus hukum, dan ilmu-ilmu lainnya yang berada di luar ilmu hukum. Penggunaan ilmu tersebut harus relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk digunakan sebagai pelengkap Bahan hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan sistem kartu (Card System), sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.¹⁰

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan Bahan hukum dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis deskriptif normatif dengan memberikan penafsiran hukum terhadap anak dalam perkawinan usia dini. Metode penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan sesuai dengan yang sebenarnya kemudian bahan-bahan tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. I, PT. Bayu Media Publishing, Malang, h.296

dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Analisis argumentatif argumentasi adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah argumentasi untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.¹¹

Penelitian hukum normatif, Bahan hukum yang diolah dilakukan dengan menyistematik terhadap bahan yang diperoleh dari hukum tertulis. Untuk menyistematisasi yaitu dengan membuat klasifikasi pada bahan hukum tersebut agar memudahkan pekerjaan analisis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dilanjutkan ke tahap pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan pada bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi.

Hasil Analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis: (b) gramatikal: dan (c) teologis.¹² Untuk memilih interpretasi sistematis dilakukan guna menentukan sistematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk menginterpretasikan secara sistematis yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada. Jika di jelaskan adalah pasal suatu

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2. Kencana, Jakarta, hlm. 29

¹² Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill. Co, Jakarta, hlm. 17-18

Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

Penafsiran ini harus dicari ketentuan yang ada di dalamnya agar saling terhubung dan hubungan yang terjadi dapat menentukan maknanya. Namun, dalam hubungan tatanan hukum yang terkodifikasi, dirujuk pada sistem yang memungkinkan dapat tersistematis dan dapat diasumsikan. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹³

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam perkawinan usia dini sedangkan, interpretasi teleologi yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.¹⁴

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada

¹³ Ph. Visser'tHoft, 2001, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta)*, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung, hlm. 25

¹⁴ Ibid. hlm. 30

kehendak dari pembentuk Undang–Undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.¹⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.6.1 BAB I : Menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai maraknya kasus Perkawinan usia dini di Kabupaten Gianyar, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
- 1.6.2 BAB II : Kajian Teori, menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai Perkawinan anak, perlindungan anak serta perlindungan hukum.
- 1.6.3 BAB III : Bab III dalam penelitian ini menguraikan dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan usia dini..
- 1.6.4 BAB IV : Bab IV Mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan dini.
- 1.6.5 BAB V : Bab V dalam penelitian ini menguraikan kesimpulan dan saran dari analisis yang ada di Bab III dan Bab IV.

¹⁵ B.Arief Sidharta (penerjemah), 2009, Meuwissen. tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Rafika Adiamas, Bandung, hlm. 56-57.